

**Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkawinan Singkat: Studi Putusan:
Mahkamah Rendah Syariah, Bera, Negeri Pahang, Kes Mal, No.
06013-049-0159 Tahun 2020 Dalam Perspektif Keadilan
Hukum**

Nurul Anis Izatul Binti Nubludin, Irwan

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia
izatunubludin98@icloud.com, irwan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This article's purpose is to provide information about Claims for Compensation in Short Marriages in the Decisions of the Lower Shariah Court, Bera, Pahang State, Kes Mal, No. 06013-049-0159 year 2020 Prospective on Legal Justice. Rejected the plaintiff's claim to seek compensation for the expenditure of wedding party expenses amounting to 30,000 Malaysian Ringgit in the content of the Syari'ah Lower Court Judgment in this article. The judge reasoned that there was no debt agreement between the plaintiff and the defendant in writing as valid evidence of the transaction. This research is a normative research by using a conceptual conceptual approach, namely by studying and looking for legal concepts or legal principles that are relevant to the case. The results of the research reveal that there is still room for the judge to accept some of the plaintiff's claims because de facto there has been a material and non-material loss suffered by the woman.

Keywords: Compensation, Short Marriage, Legal Justice

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkawinan Singkat Pada Putusan: Mahkamah Rendah Syariah, Bera, Negeri Pahang, Kes Mal, No. 06013-049-0159 tahun 2020 Perspektif Keadilan Hukum. Isi Putusan Mahkamah Rendah Syari'ah ini menolak tuntutan penggugat untuk meminta ganti rugi atas pengeluaran biaya pesta pernikahan sebesar 30.000 Ringgit Malaysia. Hakim beralasan dengan tidak adanya kesepakatan hutang piutang antara pihak penggugat dan tergugat secara tertulis sebagai bukti sah terjadinya transaksi. Penelitian ini merupakan penilitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual *conceptual approach* yaitu dengan mengkaji dan mencari konsep konsep hukum atau asas asas hukum yang relevan dengan kasus. Hasil penelitian mengungkap masih ada ruang bagi hakim untuk mengkabulkan sebagian tuntutan dari penggugat sebab secara *de facto* telah terjadi kerugian secara materil dan non materil yang dalam hal ini diderita oleh pihak wanita.

Kata kunci :Ganti Rugi, Perkawinan Singkat, Keadilan Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu langkah awal menuju terbentuknya keluarga yang bertujuan agar pasangan suami istri dapat menciptakan suasana cinta dan kepedulian dalam kehidupan.¹

Pernikahan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk melegalkan hubungan seks dengan cara dan syarat tertentu yang bertujuan untuk menjaga harga diri dalam menjalankan tuntutan agama serta untuk menciptakan hubungan kasih sayang antara suami dan istri selain untuk menambah keturunan. Dengan selesainya perjanjian tersebut, maka pasangan suami istri wajib melaksanakan tanggung jawab masing-masing untuk menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai serta saling memberikan pelayanan yang baik.²

Allah s.w.t telah berfirman dan hadis Rasulullah s.a.w sebagai berikut:

Firman Allah s.w.t:

هل جزاء الا احسان

Artinya : "Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)."

(Surah ar-Rahman : 60)³

Sabda Rasulullah saw:

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفُهُمْ بِأَهْلِهِ

(رواه الترمذی والحاكم)

Artinya : "Orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu mereka yang paling baik akhlakunya dan paling baik dengan keluarganya. ⁴

Tidak dapat disangkal bahwa setiap pasangan suami istri akan menghadapi masalah dari mulai yang ringan sampai yang berat. Masalah yang

¹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, (Mutu Cetak Sdn.Bhd : 1997),hal,30

² *Ibid*, hal 17

³ El-Qurtuby,Rasm Utsmani.Al-Quran Terjemahan.Selangor:Karya Bertari SDN BHD,2014,Surah Ar-Rahman : 60.

⁴ Bin Baz,A.A.(n.d.),*Min hadis maa saiun atsqola fil mizanil mukmin yaumal qiyamah min husnil khuluq*,hal web, <https://www.alukah.net/sharia/0/108077/>

paling berat dihadapi rumahtangga adalah perceraian. Perceraian itu dapat terjadi bertahun-tahun setelah pernikahan dijalani, akan tetapi terkadang juga cepat bahkan sesaat setelah akad nikah diucapkan. Penyebabnya bermacam-macam mulai dari perselingkuhan antara pasangan, masalah ekonomi, campur tangan keluarga, penipuan status, ketidakcocokan, keuangan dan lain sebagainya.

Setiap perceraian akan berkonsekuensi masalah keperdataan dan lain sebagainya. Diantaranya kewarisan, harta bersama, hadhanah, dan lain sebagainya.

Satu diantara masalah perceraian yang berkonsekuensi keperdataan adalah kasus yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Rendah Syariah Bera Negeri Pahang Kes Mal, No. 06013-049-0159 Tahun 2020. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 penggugat yang bernama Sabrina Binti Harun (bukan nama sebenar) dan telah mengaju gugatan kepada Muhammad Bin Zakaria (bukan nama sebenar). Rentetan kejadian yang terjadi adalah, penggugat dan tergugat akan mengadakan acara perkawinan di Bera, Pahang.

Seminggu sebelum acara berlangsung tergugat telah memaklumkan kepada penggugat bahwa beliau tidak dapat menyediakan uang hantaran sebanyak, Ringgit Malaysia sepuluh ribu (RM 10,000.00) anggaran dalam mata uang Indonesia RP 33.000.000,- *tiga puluh tiga juta rupiah* dan uang perbelanjaan acara perkawinan yang telah pun dipersetujui kedua belah pihak sewaktu perbincangan diadakan, bahwa pihak tergugat yang akan menampung segala perbelanjaan sebanyak Ringgit Malaysia dua puluh ribu (RM 20,000.00) dalam mata uang Indonesia senilai RP 60,000,000,- *enam puluh juta rupiah*. Jadi total keseluruhan tuntutan ganti rugi adalah RM 30,000,- atau senilai RP 90,000,000,-.

Tergugat telah meminta penggugat dan ayah penggugat untuk mendahulukan uang dan tergugat telah berjanji untuk membayar kembali setelah habisnya acara pesta perkawinan tersebut kerana beliau dikatakan telah membuat pinjaman berlesen. Saat sudah berlangsungnya perkawinan dan menjalani kehidupan suami istri selayaknya, dalam tempoh 24 hari perkawinan telah berlaku perceraian di luar mahkamah dan tanpa sebab yang jelas perceraian itu dilakukan melalui panggilan telefon.⁵

Pada Kasus di atas, Mahkamah Rendah Syariah telah memutuskan bahwa setelah mahkamah mendengar dan meneliti keterangan penggugat dan saksi-saksi penggugat, maka Mahkamah telah menolak tuntutan ganti rugi perkawinan ini.

Penulis telah menemukan sejumlah tulisan yang hampir sama dengan kasus yang ingin penulis kaji. Pertama, tulisan Saudara S Atalim yang berjudul

⁵ Mahkamah Rendah Syariah, di dalam "*Hujah Bertulis Plantif*", hal, 1-6.

Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN.MKS⁶ dalam tulisan ini menfokuskan kajian tentang pelanggaran janji nikah oleh tergugat, menurut penggugat, menimbulkan kerugian materil dan rasa malu kerana dia seorang dokter yang berperan tinggi dalam kalangan penduduk. Putusan pengadilan adalah mengabulkan gugatan dan menetapkan bahwa telah terjadi wan prestasi.

Kedua, tulisan Saudara Ahmad Kurniawan Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020)⁷. Tulisan ini membahas tentang tuntutan ganti rugi atas pembatalan pertunangan yang dilakukan secara sebelah pihak. Tuntutan ini sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dan mengabulkan gugatan pihak penggugat di mana telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum.

Bila dicermati dua tulisan di atas terlihat bahwa hakim menganggap telah terjadi perbuatan melawan hukum sehingga kedua dua gugatan tersebut dikabulkan. Sedangkan dalam penelitian terhadap putusan Mahkamah Rendah Syari'ah Bera Negeri Pahang Kes Mal No. 060130490159 tahun 2020 menolak tuntutan ganti rugi penggugat. Dengan demikian penulis tertarik dan memiliki alasan yang cukup untuk menelaah putusan Mahkamah Rendah Syari'ah Negeri Pahang ini meskipun sesungguhnya putusan yang diteliti ini terjadi di Negara Malaysia akan tetapi keadilan adalah bersifat umum dan berlaku bagi seluruh manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus, yaitu putusan Mahkamah Rendah Syari'ah Bera Negeri Pahang Kes Mal No. 060130490159 tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis putusan tersebut adalah pendekatan konseptual *conceptual approach*. Selain pendekatan konseptual peneliti juga menggunakan pendekatan komparasi *comparative approach* hal ini disebabkan putusan yang diteliti adalah putusan yang dalam beberapa kasus diputus berbeda oleh hakim meskipun letak permasalahan tuntutan sama. Selain itu komparasi terjadi terhadap beberapa putusan yang ada di pengadilan Indonesia dan terhadap putusan yang diteliti yang terjadi di Negeri Malaysia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan

⁶ S. Atalim, *Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan No. 82 Pdt. G/2014/PN/Mks* dalam Jurnal Hukum Adigama vol. 2 No. 2 Tahun 2019. Lihat <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/6524>

⁷ Ahmad Kurniawan, *Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020)* dalam Lihat <http://etheses.uin-malang.ac.id/42466/>

teknik dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Kantor Advokat dan Mahkamah Syariah Negeri Pahang.

PEMBAHASAN

1. Alasan-alasan yang digunakan penggugat di Mahkamah Rendah Syariah Bera, Negeri Pahang, Malaysia Kes Mal Bil 06013-049-0159 tahun 2020.

Putusan Mahkamah Rendah Syariah Bera, Negeri Pahang, Malaysia Kes Mal No. 060130490159 tahun 2020 adalah tututan Saudara IL Bt S⁸ (Penggugat/plaintif) melawan M.R Bn AM (Tergugat/defendan). Penggugat adalah bekas istri yang sah Tergugat. Mahkamah Rendah Syariah Bera, Negeri Pahang memutuskan menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat.

Semasa penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut sesungguhnya penggugat telah diceraikan oleh tergugat. Pernikahan mereka terjadi dalam tempo waktu yang sangat singkat yaitu selama 24 hari pernikahan.

Perlu ditegaskan di sini bahwa Lampiran Putusan Mahkamah Rendah Syari'ah Bera Negeri Pahang tidak diberikan baik kepada penggugat maupun tergugat⁹. Juga tidak dapat diakses melalui laman web sebagaimana yang terjadi di pengadilan pengadilan Indonesia di mana para pihak yang berperkara bahkan masyarakat luas dapat mengakses putusan putusan pengadilan melalui direktori laman web yang disediakan Mahkamah Agung. Putusan mahkamah rendah itu berupa dua lembar atau lebih surat yang intinya menyatakan menerima atau menolak gugatan. Namun apabila ada pihak berperkara tidak puas dengan putusan mahkamah, lalu melanjutkannya ke mahkamah rayuan (pengadilan tingkat banding) maka barulah mahkamah menerbitkan lampiran alasan alasan putusan tersebut. Sedangkan alasan alasan Mahkamah terhadap putusan yang tidak dibanding, diperoleh pada saat persidangan berlangsung oleh para pihak termasuk pengacara. Dengan demikian penelitian ini mendapatkan data lebih banyak dari pihak pengacara kasus ini baik melalui wawancara dan dokumen dokumen yang mereka berikan.

Berikut ini akan dijelaskan alasan-alasan penggugat yang dapat penulis ringkas dari bundel *Hujahan Bertulis Plantif* (Alasan tertulis penggugat) setebal 41 halaman tidak termasuk lampiran lampirannya yang didapat dari peguam (pengacara) pada kasus dimaksud. Alasan alasan penggugat sebagai berikut:

⁸ Untuk alasan kerahasiaan dan lain sebagainya nama nama pihak yang berperkara dalam putusan Mahkamah Rendah Syari'ah Bera Negeri pahang Kes Mal Bil 060130490159 Tahun 2020 ini hanya disebutkan inisialnya saja.

⁹ Keterangan diperoleh melalui wawancara kepada peguam (pengacara) Encik Mohd Izzat ,Bin Mohd Sa'adan Kuantan, Pahang pada tanggal 27 juli 2023,Khamis.

- Tergugat dan penggugat telah menikah pada tanggal 1 November 2019. Pernikahan ini didaftarkan di pejabat Agama Islam Bera Negeri Pahang Malaysia.
- Sebelum pernikahan dilaksanakan tergugat telah memaklumkan kepada tergugat dan ayah tergugat bahwa tergugat tidak memiliki uang hantaran yang telah disepakati sebesar RM 10,000.00. Uang hantaran ini disepakati sebagai uang untuk biaya pesta pernikahan (walimatul urus) di rumah penggugat.
- Tergugat telah meminta kepada penggugat dan ayah penggugat untuk mendahulukan terlebih dahulu uang penggugat dan ayah penggugat untuk mengadakan pesta pernikahan dan seterusnya tergugat berjanji akan membayarnya semula kepada penggugat dan ayah penggugat setelah pesta pernikahan dilaksanakan.
- Disebabkan janji dan permintaan tergugat tersebut, penggugat dan ayah penggugat telah mengeluarkan uang mereka sendiri terlebih dahulu untuk membuat persediaan pesta pernikahan dan lain sebagainya yang jumlahnya melebihi RM30,000.00.
- Pernikahan tersebut hanya bertahan selama 24 hari saja disebabkan tergugat menceraikan penggugat pada tanggal 24 November 2019 melalui panggilan telepon tanpa persetujuan pengadilan.
- Di dalam masa pernikahan singkat tersebut menurut keterangan penggugat dan tergugat mereka telah melakukan hubungan suami isteri (seks) sehingga seolah olah tergugat hanya mencari kenikmatan syahwat sebelum menceraikan penggugat.
- Di dalam masa pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Selepas perceraian tersebut penggugat telah mengalami tekanan mental yang dahsyat dan kerugian uang disebabkan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat
- Dalam masa bertunangan antara tergugat dengan penggugat, ternyata tergugat telah pula bertunangan dengan wanita lain. Keterangan ini didapat dari saksi MF Bn Moh yang merupakan bapa saudara sepupu dari tergugat¹⁰ Dengan demikian Tergugat dinilai memiliki niat jahat kepada Penggugat.
- Berdasarkan keterangan saksi itu pula (MF Bn Moh) bahwa Tergugat adalah seorang tentara yang dinilai dapat memenuhi tuntutan ganti rugi tergugat.

¹⁰ Tetuan Izzat & Co.2020.*Hujahan Bertulis Plantif*.Mahkamah Rendah Syariah. Jalan Bukit Ubi.Kuatntan.Pahang. hal. 33

- Mahkamah Rendah Syariah Bera memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang diajukan tergugat baik dari segi materi gugatan maupun domisili.
- Tuntutan ganti rugi ini memiliki alasan akademis sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Mahmud as Syardhawi di dalam kitab *Fiqh al Ahwal as Syakhshiyah* halaman 135:

التعويض عن الطلاق التعسفي استنادا الى مبدأ التعويض عن الضرر الناتج عن التعسفي ومبدأ التعويض عن الضرر الذي يقدر بحسب الضرر الواقع على الطلقة او افراد الاسرة بالفعل الى الزام الطلق برفع الفقر عن الطلقة وكفاية حق عيشها حياة كريمة الى مدة زمنية معينة

Artinya: Ganti rugi Talaq Ta'assuf (talak sewenang-wenang) adalah karena kesannya menyebabkan kemudharatan. Kadar ganti rugi ini berdasarkan tahap kemudharatan yang dialami oleh isteri atau keluarga. Perintah membayar ganti rugi adalah bertujuan meringankan kesengsaraan yang dialami oleh bekas isteri sampai pada masa tertentu.

- Prof. Dr. Muhammad al Zuhaily dalam kitabnya *al Ta'widh al Maly 'An al Thalaq* pada halaman 31 sd 35 memaparkan bahwa talak yang dilakukan sewenang wenang (*talaq ta'assuf*) adalah penyalahgunaan hak suami dalam menjatuhkan talaq pada isterinya yang mengakibatkan si isteri tersakiti dan menimbulkan kemudharatan di mana Syari'ah pasti tidak menyetujuinya bahkan layak untuk dihukum. Petikan tulisan dalam kitab *al Ta'widh al Maly 'An al Thalaq* sebagai berikut:

تبين لنا ان الطلاق جائز ومشروع وانه تصرف انفرادي وانه حق للرجل و الإنسان إذا تصرف بحقه فلا ضمان عليه ولا مسؤولية ولكن اذا اساء الشخص في استعمال حقه و تعسف فيه وتجاوز الحدود المرسومة له واستغل هذا الحق في ابداء غيره والحاق الضرر به فإن الشرع او القانون لايقره على ذلك بل يواخذ عليه ويفرض عليه الضمان او التعويض بناء على نظرية التعسف في استعمال الحق

- Tuntutan ganti rugi sejatinya telah diberlakukan oleh Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia (JKSM) dengan menerbitkan surat Arahan Amalan (surat edaran) No. 01 tahun 2000. Dan telah menerima kasus tuntutan ganti rugi perkawinan sejak 1 Juni 2001. Dengan demikian tuntutan ganti rugi perkawinan ini dibenarkan dan tidak bertentangan dengan undang undang dan hukum syara'.
- Diakui bahwa undang undang keluarga Islam dan Enakmen Keluarga Islam seluruh Malaysia tidak mengatur secara khusus ketentuan ganti rugi perkawinan akan tetapi berdasarkan syeksen 135 (2) Enakmen

Undang undang Keluarga Islam Negeri Pahang tahun 2005 mahkamah boleh melakukan ijtihad dalam rangka mewujudkan keadilan hukum¹¹.

- Berdasarkan keterangan penggugat dengan bukti bukti berupa kwitansi berkenaan dengan biaya yang telah dikeluarkan maka berikut ini daftar rincian jumlah nilai yang telah dibelanjakan penggugat:¹²

Bil	Perkara	Harga(RM)	Jumlah	Jumlah (IDR)
1.	Uang Hantaran		RM 10,000.00	RP 32,000,000.00
2.	Gelang dan Cincin Perkawinan		RM 3,000.00	RP 9,000,000.00
3.	Biaya Perkawinan		RM 25,028.00	RP 80,000,000.00
	● Sapi 2 ekor	RM 5,000.00		
	● Tenda dan Makan Beradab	RM 4,450.00		
	● Pinjaman Uang Berlesen	RM 3,000.00		
	● Pekej Fotografi	RM 1,900.00		
	● Kad Jemputan	RM 1,898.00		
	● Pakej Solek	RM 5,500.00		
	● Pembelian Perabot	RM 2,600.00		
	● Pembelian Ayam	RM 680.00		
	Jumlah Keseluruhan	RM 38,028.00		
	Jumlah Yang Dituntut		RM 30,000.00 (RP 90,000,000,-)	

Atas dasar alasan alasan dan fakta fakta kejadian serta sejumlah alasan yang didasari oleh undang undang dan hukum syara' di samping bahwa mahkamah rendah syari'ah memiliki otoritas untuk menerima

¹¹ Syeksen 135 ayat 2 Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Pahang, "Mengenai perkara amalan dan acara dalam perbicaraan hal ehwal suami isteri yang tidak diperuntukkan dengan nyata dalam Enakmen ini atau dalam apa apa kaedah kaedah yang dibuat di bawah Enakmen ini atau dalam Enakmen Pentadbiran, Mahkamah boleh memakai apa apa amalan dan acara yang difikirkannya wajar bagi mengelakkan ketidakadilan dan bagi menyelesaikan perkara perkara yang dipersoalkan antara pihak pihak.

¹² Tetuan Izzat & Co.2020.*Hujahan Bertulis Plantif*.Mahkamah Rendah Syariah. Jalan Bukit Ubi.Kuatntan.Pahang. hal.22-23.

perkara tersebut maka penggugat mengajukan tuntutan gantirugi sebesar RM. 30.000,00,-

2. Alasan Hakim Mahkamah Rendah Syari'ah Bera Negeri Pahang Terhadap Penolakan Tuntutan Penggugat Pada Kes Mal Bil : 06013-049-0159 Tahun 2020.

Alasan Hakim Mahkamah menolak tuntutan Penggugat tidak dimuat dalam lembaran lembaran putusan. Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syari'ah Bera Negeri Pahang atas Tuntutan perkara Kes Mal Bil : 06013-049-0159 Tahun 2020 ini hanya dimuat dalam dua lembar kertas yang pada intinya menolak tuntutan Penggugat. Bunyi putusan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Setelah Mahkamah Mendengar dan Meneliti keterangan Penggugat (plaintif) dan saksi-saksi penggugat(plaintif) dan setelah Mahkamah meneliti *Hujahan Bertulid Plantif* Maka Mahkamah menolak tuntutan bagi Ganti Rugi Perkahwinan.”

Bunyi Putusan ini dimuat di dalam borang Mahkamah Syariah 28 subsyeksyen 135(3) bertanggal 8 Februari 2022/6 Rejab 1443 H.Sedangkan tuntutan *Hujahan bertulis plantif* (tututan penggugat) diajukan ke Mahkamah bertanggal 21 Juli 2020 dengan demikian tenggat waktu antara pengajuan gugatan dan terbitnya putusan mahkamah memakan waktu satu tahun tujuh bulan.Waktu tersebut dianggap lama namum perlu dimaklumi waktu yang lama tersebut dikarnakan ketidakhadiran tergugat di dalam persidangan persidangan.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa terhadap putusan-putusan mahkamah yang tidak dirayu (banding) maka alasan-alasan putusan tidak dikeluarkan oleh mahkamah. Ketentuan ini berlaku pada setiap mahkamah syariah di Negara Malaysia. Oleh karena tuntutan perkara Kes Mal Bil : 06013-049-0159 Tahun 2020 tidak dilanjutkan ke Mahkamah Rayuan(banding) maka informasi tentang alasan-alasan hakim mahkamah menolak tuntutan penggugat hanya didapat melalui pihak yang hadir dalam persidangan yakni pihak penggugat dan pengacara. Dalam penelitian ini, alasan-alasan tersebut diperoleh dari En. Mohd Izzat Bin Mohd Sa'adan selaku pengacara penggugat.

Berdasarkan keterangan Encik. Mohd Izzat Bin Mohd Sa'adan selaku pengacara penggugat, alasan utama hakim memutuskan menolak gugatan penggugat adalah kewajiban melaksanakan walima ul urs itu memang ada pada pihak laki laki (suami) akan tetapi bilamana pihak wanita (isteri) dan keluarganya berinisiatif melaksanakan sendiri acara walimatul urs tersebut maka segala biaya tidak dapat dituntutkan kepada pihak laki laki (suami). Sebagaimana yang dituturkan Encik Mohd Izzat Bin Mohd Sa'adan Selaku Pengacara Penggugat:

"Hakim kata nak kawin ni kewajiban kepada suami untuk uruskan walimatul urus tapi kalau perempuan nak buat tak salah haa macam tu laaa, dalam kes ni IL Bt S(penggugat) yang beria-ria buat hurmm ya laaa memang adat kita dah kan buat sembelih lembu, cari baju, cari fotografer semua sekali tapi hakim kata bukan kewajiban perempuan pun nak buat tu adalah kewajiban lelaki tapi kalau perempuan nak buat buat laaa tapi kalau apa-apa tak boleh laaa nak claim macam tu haa lebih kurang macam tu laaa diringkaskan".

Berdasarkan keterangan Encik Mohd Izzat Bin Mohd Sa'adan selaku pengacara penggugat bahwa kewajiban melaksanakan walimatul urus itu memang kewajiban laki-laki (suami) namun bilamana pihak wanita(istri) mengadakan walimatul urus maka tidak ada masalah meskipun walimatul urus itu dilaksanakan dengan megah dan memakan banyak biaya akan tetapi pihak wanita tidak dapat menuntut segala biaya itu menjadi tanggungan pihak laki-laki (suami) kerna hal ini didasari niat pelaksanaan walimatul urus itu berasal dari inisiatif pihak wanita semata-mata tanpa melakukan mufakat dengan pihak laki-laki(suami). Maka atas dasar ini Hakim mahkamah menolak tuntutan pihak penggugat adapun alasan-alasan lain dalam Kes Mal : 06013-049-0159 Tahun 2020 tidak didapatkan.

3. Analisis Putusan Mahkamah

Mahkamah Rendah Syariah Bera Negeri Pahang telah memutuskan Kes Mal : 06013-049-0159 Tahun 2020 dengan menolak tuntutan pihak penggugat. Sebagaimana dimaklumi putusan itu tidak dibanding ke Mahkamah Rayuan oleh pihak Penggugat. Dengan demikian berarti para pihak menerima putusan tersebut dan putusan telahpun disebut inkrah. Namun bukan berarti dengan tidak dibandingnya putusan tersebut tidak ada celah untuk menganalisis putusan mahkamah rendah syariah tersebut. Terlebih lagi bilamana kita membaca segala alasan alasan yang dikemukakan oleh pihak penggugat cukup kuat dan beralasan. Karenanya tuntutan rasa keadilan belum terpenuhi secara maksimal.

Dalam kasus ini sesungguhnya penggugat telah dapat menunjukkan suatu peristiwa benar benar terjadi yakni walimatul urs dan pernikahan singkat yang hanya berlangsung selama 24 hari¹³. Ini jelas merugikan pihak penggugat. Dalam hal ini hakim mahkamah, sesuai keterangan pengacara, menyandarkan

¹³ Tentang perkara perkawinan singkat ini penggugat mengaku bahwa Tergugat menceraikannya melalui panggilan telepon hal mana sesungguhnya dalam sistem peradilan di Malaysia tidak diakui, sebab perceraian hanya diakui apabila diikrarkan di pengadilan. Keterangan ini ada dimuat di dalam Hujjahan Bertulis Plaintif. Jika seandainya hakim mahkamah rendah syari'ah tidak mengakui adanya perceraian tersebut, sesungguhnya materi tuntutan masih dapat digelar karena inti tuntutan adalah ganti rugi biaya pesta pernikahan bukan ganti rugi perkawinan singkat.

argumennya kepada siapa kewajiban biaya walimatul urs dibebankan. Lagi pula biaya walimatul urs itu telah disepakati nantinya akan dibayar lunas oleh Tergugat. Peneliti meyakini dalam hal ini hakim tentu tidak hanya semata mata menyandarkan kepada keterangan lisan Penggugat. Hakim tentu akan menuntut bukti tertulis bahwa telah terjadi kesepakatan itu. Nyatanya dalam Hujahan Bertulis Plaintiff tidak disertakan perkara bukti tertulis ini, hal mana jika memang benar ada tentu akan menjadi “senjata” ampuh untuk dapat meloloskan tuntutan ganti rugi Penggugat.

Bila mana mengacu kepada Asas Konsensualisme dalam hukum yaitu suatu asas yang berlaku apabila terjadinya perjanjian dan telah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian terlaksana apabila adanya kata sepakat dan telah terucap sehingga tidak perlu lagi catatan tertulis atau formalitas tertentu¹⁴, maka seyogyanya hakim Mahkamah dapat melakukan penelusuran untuk menyatakan bahwa perbuatan benar terjadi melalui bukti persangkaan (*qorinah*)¹⁵. Dalam kasus ini seharusnya hakim mengamati budaya dan kebiasaan masyarakat di Negeri Pahang khususnya dalam pembiayaan pesta perkawinan (*walimatul urs*) pihak manakah yang secara umum menanggung biaya pesta pernikahan tersebut, pihak suami atau pihak isteri?. Secara umum dan ini berlaku di mana mana negeri malaysia juga di Indonesia ditemukan istilah uang hantaran yang nantinya akan digunakan sebagiannya bahkan seringkali keseluruhannya untuk acara *walimatul urs*. Beberapa penelitian mengungkap besaran biaya uang hantaran ini membebani pihak laki laki untuk menikah sehingga harus berhutang. Dalam beberapa kasus, karena tingginya uang hantaran ini pada satu daerah maka laki laki akan mengurungkan niatnya menikah di daerah tersebut¹⁶.

¹⁴ Selain asas konsensualisme terdapat lagi dua asas yang perlu diperhatikan. Asas asas itu adalah *pertama* Asas Itikad Baik adalah asas yang berlaku selagimana tidak melanggar undang-undang dan peraturan. Kesepakatan yang telah dibuat tidak boleh ditarik sesuka hati melainkan persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat haruslah mempunyai kejujuran, tidak menyembunyikan sesuatu dan tidak memanipulasikan sesuatu. *Kedua*, Asas Pacta Sunt Servanda atau disebutkan sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah membuat perjanjian. Sekiranya salah satu pihak melanggar perjanjian maka Hakim berwenang untuk memaksa agar pihak yang melanggar perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Hakim juga berwenang untuk memerintahkan pihak yang melanggar janji untuk membayar ganti rugi.

¹⁵ Bukti persangkaan sejatinya diatur dalam 164 HIR/284 Rbg dan 1866 KUHPERDATA yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi karena sifatnya yang umum dan diterima secara filosofis sebagai sebuah alat bukti tentu saja ini dianut oleh aturan pembuktian di negara negara dunia.

¹⁶ Lihat penelitian Ridwan Nurdin, *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkahwinan* Jurnal Hukum Keluarga UIN ar Raniry Banda Aceh. Studi dilakukan di Pulau Pinang Malaysia. Lihat Juga Fatin Najwa Binti Kamaruddin yang menulis penelitian skripsi tentang Penetapan Uang Hantaran di Pualu Pinang Malaysia, di mana dalam penelitian tersebut didapati

Dengan demikian meskipun hakim tidak menemukan surat autentik tentang perjanjian hutang piutang biaya pesta pernikahan (*walimatul urs*) antara penggugat dengan tergugat, melalui bukti persangkaan ini hakim dapat menetapkan bahwa telah terjadi kesepakatan itu. Selanjutnya hakim atas dasar bukti persangkaan yang tentu saja tidak didasari oleh bukti autentik tersebut dapat menetapkan besaran tuntutan yang wajar dipenuhi oleh Tergugat. Dalam hal ini besaran tuntutan tidak harus dipenuhi keseluruhan jumlah atau nilai uangnya.

Adapun kewajiban pelaksanaan *walimatul urs* itu dibebankan kepada pihak laki laki dapat dijelaskan melalui sejumlah nash hadis Nabi Saw diantaranya:

عن انس بن مالك ان النبي ﷺ راي على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما هذا او مه فقال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة ذهب فقال بارك الله لك اولم ولو بشاة¹⁷

Artinya : Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi s.a.w melihat bekas kekuning-kuningan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun berkata, "Apa ini? atau mah!" dia (Abdurrahman) berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang perempuan dengan (maskawin) sebesar satu biji emas." Maka beliau pun bersabda, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, buatlah walimah (jamuan) walaupun hanya dengan seekor kambing." Shahih: Adab Az-Zafaf (65-68), Al Irwa(1923): Muttafaq Alaih.

Di dalam Hadis ini Nabi saw memerintahkan Abdurrahman Bin Auf untuk melaksanakan *walimatul urs*. Sedangkan Abdurrahman itu berkedudukan sebagai suami. Nabi tidak memerintahkan wanita atau pihak keluarga wanita untuk melaksanakan *walimatul urs*. Dengan demikian pelaksanaan *walimatul urs* ini dibebankan kepada laki laki atau suami.

Di dalam Hadis Nabi Saw yang lain juga dinyatakan :

وروي أحمد في مسنده بسند لا بأس به عن بريدة - رضي الله عنه - قال: لَمَّا خُطِبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّهُ لَا بَدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ"

Artinya: Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dengan isnad kategori *la ba'sa bi hi* dari Buraidah RA beliau berkata: tatkala Ali meminang Fathimah bersabda Rasul Saw sesungguhnya dia mesti melaksanakan *walimatul urs*.

besarnya uang hantaran mengakibatkan kesulitan para laki laki untuk menikah terutama mereka yang berlatar belakang ekonomi rendah.

¹⁷ HR Bukhari Muslim.

Adapun hukum melaksanakan *walimatul 'urs* ini adalah sunnah sebagaimana disebutkan dalam kitab Mahalli¹⁸

Tidak asing lagi sekiranya terjadi perkawinan pasti akan adanya walimatul urus antara laki-laki dan perempuan. Di dalam syariat Islam walimatul urus hendaklah dilakukan secara sederhana mungkin agar tidak terjadi pemubaziran apalagi untuk memamerkan kekayaan (*riya'*). Hal inilah yang menjadi dasar bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat tidak mesti dikabulkan keseluruhannya. Sebab dengan kos pesta perkawinan RM 30.000,00 dinilai telah berlebihan sehingga tidak dapat dikatakan sederhana.

Perlu diuraikan lebih lanjut bahwa Mahkamah Syariah adalah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan kasus mal (harta benda), jenayah(pidana) dan permohonan sijil faraid (kewarisan) sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan undang undang di Malaysia¹⁹. Mahkamah Syariah dinamakan Mahkamah Kadi bertugas menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam bagi setiap negeri di Malaysia. Setiap daerah mempunyai sebuah Jabatan Agama Islam yang mengurus urusan berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan undang-undang di bawah peruntukan pentadbiran Agama Islam. Terdapat beberapa peranan dan tujuan adanya mahkamah syariah ini di antaranya adalah, menjamin setiap muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, menjamin kesejahteraan orang Islam, dapat melahirkan keluarga yang berpegang teguh pada ajaran Islam sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah rumahtangga dan tempat untuk menuntut hak-hak yang berkaitan.

Pelaksanaan Pengadilan di Mahkamah Syariah mempunyai tiga tingkat, yang pertama adalah mahkamah rendah syariah membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh enakmen negeri, mendengar dan memutuskan kasus-kasus tersebut, menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan mahkamah dan membicarakan kasus-kasus di peringkat daerah. Tingkat yang kedua adalah Mahkamah Tinggi Syariah membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan kepadanya, mengeluarkan perintah kasus-kasus sivil dan pidana, menyelesaikan dan mengesahkan kasus faraid, menguruskan kasus rayuan (*banding*) , dan menyediakan jurnal mahkamah untuk diterbitkan (bagi sebagian negeri). Tingkat yang terakhir ialah Mahkamah Rayuan Syariah (Pengadilan Tingkat Banding) ditugaskan untuk mendengar kasus banding, mempunyai kekuasaan untuk membatalkan atau mengesahkan putusan hukuman mahkamah syariah, juga dapat mengurangi hukuman, memerintahkan supaya

¹⁸ Kitab Mahalli. Juz 3 hal. 294.

¹⁹ Lihat diantaranya Enakmen undang undang Hukum Keluarga Islam Negeri Pahang tahun 2005. Lihat Juga Enakmen Pentadbiran undang undang Islam Negeri Pahang 2005 Syeksen 48 (2) (b).

diadakan pembicaraan semula atau pembicaraan ulang, menerima banding terpidana yang dihukum penjara atau denda tidak kurang RM 25.00 dan telah membuat banding mengikut prosuder yang telah ditetapkan, dan setiap tuntutan banding akan didengar sekurang-kurangnya oleh tiga panel (hakim) tingkat banding yang merupakan hakim tinggi tingkat banding syariah yang dilantik oleh Ketua Pejabat Hakim Rayuan Syariah.

Berdasarkan Syeksen 2 Tafsiran Enakmen Pentadbiran Undang Undang Islam Negeri Pahang tahun 2005 yang memuat kewenangan Mahkamah Syariah dan Enakmen Undang undang Keluarga Islam Negeri pahang Tahun 2005 Syeksen 135 (2) yang memberikan kewenangan bagi hakim untuk mengambil kebijakan dalam mana mana hal yang tidak diatur secara rinci demi memperoleh keadilan hukum, maka Mahkamah Rendah Syari'ah Bera Negeri Pahang telah tepat menerima gugatan ganti rugi perkawinan singkat ini yang dimuat dalam kasus Kes Mal Bil : 06013-049-0159 Tahun 2020. Hanya saja menurut telaahan peneliti, kewenangan yang diberikan oleh Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Pahang Tahun 2005 yaitu dalam rangka mencari kebenaran hukum materil tidak secara maksimal diupayakan. Hakim hanya berfokus kepada hukum formil. Yakni dengan menyatakan bahwa tidak terbukti bahwa pengeluaran biaya sejumlah RM. 30.000,- oleh keluarga Penggugat dan tergugat adalah didasari atas kesepakatan yang dibuat dan diketahui bersama, di mana nantinya pihak tergugat akan mengganti seluruh biaya pesta perkawinan Tergugat dan Penggugat. Meskipun patut diakui bahwa penunjukan bukti bukti dibebankan kepada pendakwa.

Berdasarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pahang)2005 itu pula, terdapat banyak tuntutan yang dapat lakukan seorang isteri yang telah diceraikan kepada suami antara lain *Mut'ah*, *Nafkah Iddah*, *Harta Sepencarian*, *Tuntutan Ganti Rugi* dan banyak lagi. Tuntutan yang dinyatakan bukanlah bermaksud untuk memberatkan atau menganiaya bekas suami. Namun bertujuan untuk mengurangkan kesulitan yang akan dialami oleh seorang istri yang baru diceraikan untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang dan tuntutan yang dibuat sebagai peringatan dan tauladan kepada masyarakat untuk tidak sembarangan malakukan perceraian.

Di dalam Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 :-Syeksyen 48. Bidang Kuasa Mahkamah Rendah Syariah.

(1) Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di dalam sempadan tempatan bidang kuasa yang diberi kepadanya dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

(2) Mahkamah Rendah Syariah hendaklah ;-

(a) Dalam bidang kuasa jenayah, membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam di bawah Enakmen ini atau di bawah undang-undang bertulis lain yang memberi kepada mahkamah Syariah bidang kuasa untuk membicarakan apa-apa kesalahan yang mana hukuman maksimum yang diperuntukkan tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara bagi tempoh yang tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya; dan

(b) Dalam bidang kuasa mal, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan tatacara yang Mahkamah Rendah Syariah dibenarkan mendengar dan memutuskannya dalam mana jumlah atau nilai hal perkara yang dipertikaikan tidak melebihi seratus ribu ringgit atau yang tidak dapat dianggarkan dengan uang.

Dalam kasus ini boleh juga merujuk pada Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2005:-

Syeksyen 15. Pertunangan.

“Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum Syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan mengahwini dengan pihak yang satu lagi tanpa apa-apa sebab yang dikira munasabah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkawin dengannya, maka disini pihak yang telah mungkir janji adalah bertanggung jawab memulangkan pemberian pertunangan, sekiranya ada, atau nilainya dibelanjakan untuk membuat persediaan bagi perkawinan, dan demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah”.

Berdasarkan Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 di atas, bahwa Mahkamah diberi kuasa untuk mendengar, membicarakan dan membuat putusan mengenai kasus ini apatah lagi tanpa ada penolakan dan ketidakhadiran di Persidangan kasus dari tergugat. Berdasarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2005 mengenai pertunangan dalam kasus ini dapat menjadi rujukan kerana tuntutan ganti rugi dalam pertunangan pun dapat dituntut apalagi terhadap tuntutan ganti rugi dalam perkawinan yang singkat, yang dengan jelas korbannya adalah bekas isteri dan keluarga besarnya. Tentu saja adalah sangat beralasan untuk mendapat penerimaan tuntutan ganti rugi dari putusan Mahkamah Rendah Syariah.

Syariah Islam sangat menitik beratkan tentang bagaimana untuk membangun keluarga serta menjaga hubungan suami istri, atas dasar itu Islam telah menetapkan tatacara dan garis panduan tertentu dalam menjaganya. Disebabkan kekuatan dan keutuhan akad perkawinan sehingga Allah s.w.t menyebutkan dalam al-Quran surah an-Nisa': 21 :-

واخذن منكم ميثقا غليظا

Artinya: “....dan mereka pula (istri-istri kamu itu) telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu.”

Setiap orang yang menikah mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan yaitu melakukan perceraian. Meskipun begitu, hendaklah disertakan bersamanya sebab yang kukuh serta alasan yang tidak melanggar hukum syarak. Dalam kasus ini perceraian yang dilakukan dalam tempo waktu yang sangat singkat yakni 24 hari perkawinan telah diceraikan, perceraian ini sangat melukai perasaan terutamanya kepada penggugat dan tentu saja bertentangan dengan konsep saudara seiman yang amat menjaga persaudaraan sesama Islam. Suatu perjanjian yang dibuat ketika bertunang tidak boleh dihentikan melainkan ada alasan dan sebab yang beralasan.

Dalam Firman Allah s.w.t dalam surah al-Maidah: ayat 1:-

ياايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود

Artinya :

“Wahai orang beriman, tunaikan serta sempurnakan perjanjian kalian.”

Mengenai beban pembuktian bagi suatu kasus, dapat dilihat di Ordinan 47 Tahun 2001, Beban Pembuktian dinyatakan adalah:-

Syeksyen 73. Beban pembuktian.

(1) Sesiapa yang berhasrat agar mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa jua hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya hendaklah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban pembuktian terletak pada orang itu.

Di dalam kasus yang diteliti Ini terdapat bukti kuitansi yang dapat disediakan sebagai tuntutan ganti rugi perkawinan, penggugat dapat membuktikan sebanyak Tiga Puluh Ribu **(RM 30,00000)**²⁰

Bil.	Kuitansi	Jumlah (RM)	Perbandingan dalam Jumlah dalam
------	----------	-------------	---------------------------------

²⁰ Bukti bukti kwitansi ada dilampirkan dan ditunjukkan dalam persidangan oleh pengacara Penggugat.

			(RP)
1.	Kuitansi Pembiayaan Jurugambar dari LensArt Motion pada tanggal 03.11.2019.	RM 1,900.00	RP 6,000,000.00
2.	Kuitansi Pembiayaan Pelamin dari Riedzs Bridal Collection pada tanggal 13.05.2019.	RM 1,000.00	RP 3,000,000.00
3.	Kuitansi Kad Jemputan Perkawinan dari Sulaiman & Rokiah Enterprise pada tanggal 21.06.2019.	RM 1,898.00	RP6,300,000.00
4.	Kuitansi Pembiayaan Set perabot dari Aida Zarina Enterprise pada tanggal 29.10.2019.	RM 2,600.00	RP 8,600,000.00
5.	Kuitansi Pembiayaan Tenda Acara dan Penyediaan Set Makan Beradab dari JKRR Felda Triang 1 pada tanggal 01.11.2019.	RM 4,450.00	RP 14,800,000.00
6.	Kuitansi Pembelian Ayam dari Tok Chet Enterprise pada tanggal 02.11.2019.	RM 680.00	RP 2,200,000.00
7.	Kuitansi Pembelian Lembu 2 ekor dari Kak Pah Sempoi Enterprise pada tanggal 01.11.2019.	RM 5,000.00	RP 16,600,000.00
8.	Surat Pelepasan daripada Syarikat Pinjaman Uang Berlesen LKY Maju Sdn Bhd pada tanggal 03.01.2020	RM 3,000.00	RP 9,000,000.00
		RM 20,528.00	RP 60,000,000.00

Berdasarkan kepada kuitansi yang telah dibuktikan oleh pengugat, ini lagi menguatkan bahwa tuntutan ganti rugi perkawinan dapat dituntut di Mahkamah Rendah Syariah Bera, Negeri Pahang. Pengugat memang benar telah membelanjakan uang yang banyak untuk menjalankan walimatul urus antara pengugat dengan tergugat.

Dalam pada itu apabila terjadi kasus kasus hukum seperti pembatalan pertunangan, perceraian singkat, poligami dan sebagainya maka seringkali yang menjadi korban adalah pihak wanita. Terutama jika dilihat dari pandangan masyarakat melayu terhadap wanita yang dibatalkan pertunangannya, wanita yang dicerai terlebih dalam waktu singkat, dan wanita yang dipoligami. Masyarakat memandang dan memang demikianlah kenyataannya, wanita yang berstatus janda akibat dicerai atau bekas dipinang orang lain atau menjadi isteri yang dimadu seringkali dipandang rendah. Sehingga sedapat mungkin wanita wanita itu akan mempertahankan pernikahannya meskipun terasa sakit. Tentu saja syari'at Islam tidak menginginkan keadaan seperti itu. Syari'at Islam menghendaki keadilan mesti ditegakkan tanpa membeda bedakan kedudukan strata sosial dan gender. Allah Swt berfirman dalam Surat al Nisa'; 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini memerintahkan setiap individu untuk bersikap profesional dan menuntut seorang untuk berlaku adil kepada seluruh manusia tanpa pandang bulu bahkan sampai kepada tanpa memandang latar belakang agama seseorang

Para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan keadilan menjadi empat makna (M. Quraisy Shihab, 1996:114-116). *Pertama*, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. *Kedua*, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. *Ketiga*, adil dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya". Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. *Keempat*, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu

terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya²¹.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara²².

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak²³.

Al-Quran telah menetapkan hak mutlak bagi seorang wanita untuk mendayagunakan segala haknya selama tidak pada jalan yang diharamkan syariat. Allah memberikan keleluasaan kepada kaum wanita untuk mengumpulkan harta berapa pun jumlahnya, hak warisan, hibah, wasiat, utang piutang, hak kepemilikan, bekerja, akad transaksi, mendamaikan, tuntutan pengadilan, dan hak untuk melakukan apa saja yang menjadi miliknya, seperti hak mintak izin kerelaannya jika ingin menikahi. Oleh kerananya, tidak ada hak bagi wali untuk memaksanya menikahi seseorang yang dibencinya. Jika diceraikan oleh suaminya maka harus ada syarat kerelaannya. Wanita boleh menebus dirinya dari suami jika sudah tidak sanggup lagi hidup bersamanya. Kebolehan wanita ikut serta dalam hak kepemilikan, pemanfaatan baik kerana hibah, wasiat, jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya ditegaskan berulang-ulang dalam al-Quran. Islam mengakui hak-hak wanita dari hasil usahanya sendiri tanpa sebarang diskriminasi. Sangat wajar jika seseorang bekerja, lalu mendapatkan hasil dan menikmatinya.

Dengan demikian wanita harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan hak haknya dan tidak boleh diabaikan. Atas dasar ini, Kerajaan Malaysia telah membentuk satu kementerian khusus untuk menjaga hak-hak wanita yaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWK) yang bertanggung jawab menilai dasar dan arah untuk mencapai sasaran kesamarataan jantina, pembangunan keluarga dan masyarakat penyayang selari dengan komitmen kerajaan kepada penghapusan semua bentuk

²¹ Disarikan dari tulisan Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, Tulisan dalam Jurnal. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/78>

²² Portal Fakultas Hukum tersedia di <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>

²³ Ibid.

diskriminasi terhadap wanita. Terdapat beberapa objektif daripada pembangunan kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat diantaranya adalah untuk meningkatkan penyertaan dan peran aktif wanita, keluarga dan masyarakat sebagai penerima dan penyumbang faedah pembangunan negara, memelihara hak-hak dan kepentingan dengan adil dan saksama tanpa ada unsur diskriminasi. Lembaga ini juga dapat memperluaskan peluang yang adil kepada wanita dan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, memantapkan institusi keluarga dan memastikan sistem penyampaian berjalan dengan baik.

Ada beberapa agensi dan jabatan yang berada dibawah kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat antaranya adalah Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) yang bertanggung jawab dalam memperkasa penglibatan wanita ke arah pembangunan sosial, Institusi Pengupayaan Wanita Bagi Anggota Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NIEW) dan banyak lagi. Terdapat beberapa objektif daripada penubuhan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat antaranya adalah untuk memperkukuhkan institusi perkawinan dan kekeluargaan untuk kestabilan sosial, dapat menjaga kedudukan wanita untuk mencapai kesejahteraan bersama dan untuk dapat meningkatkan kerjasama strategik dengan pihak berkepentingan untuk sistem sokongan yang berkesan dan menyeluruh²⁴.

Hak dan martabat wanita diangkat sebagai prinsip penghormatan seperti dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan yaitu dalam perkara 8 menjelaskan bahawa "Semua orang adalah sama rata di sisi Undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi Undang-undang". Terbukti Perlembagaan Malaysia mengakui dan mendapat perlindungan sama rata semua golongan baik dari segi beragama, bangsa dan jantina seseorang. Walau bagaimana pun kerajaan tetap mementingkan dan mendahulukan wanita terbukti kerana kerajaan telah mengambil pendekatan dengan mewujudkan khusus satu kementerian pembangunan wanita dan wujudnya agensi dibawahnya untuk membantu pelaksanaanya.

Terdapat satu lagi alternatif yang telah diwujudkan oleh Kerajaan dengan mewujudkan Bahagian Sokongan Keluarga di setiap Negeri. Dari segi Badan Pelaksanaan di Institusi Kehakiman Syariah Malaysia telah mewujudkan Bahagian Sokongan Keluarga di setiap negeri yang berperan untuk membantu khususnya golongan wanita apabila bekas suami tidak melunaskan hutang penghakiman. Yang dimaksudkan dengan hutang penghakiman di sini adalah, tergugat telah dinyatakan bersalah dan telah diperintahkan oleh pihak Mahkamah untuk melunaskan tuntutan yang telah diputuskan oleh pihak Mahkamah, sekiranya tidak dilaksanakan oleh tergugat maka, di sinilah Bahagian Sokongan Keluarga berperan untuk membawa tergugat agar

²⁴ Laman portal rasmi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tersedia di <https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/index.php?r=portal/index>

membuat pembayaran yang telah ditetapkan oleh putusan Mahkamah.²⁵ Mengenai Bahagian Sokongan Keluarga ini dapat dilihat dalam Akta Prosedur Kewangan 1957 Penubuhan dan Arahan Akaun Amanah di Bawah Syeksyen 9 Akaun Amanah Bahagian Sokongan Keluarga Pahang Jabatan Kehakiman Syariah Pahang (Kod: 65112)²⁶

Jika Pemerintah atau Kerajaan Malaysia begitu mengambil perhatian terhadap hak hak wanita, maka selayaknyalah para hakim khususnya hakim pada Mahkamah Syari'ah untuk lebih serius dalam mengungkapkan fakta fakta dengan menggunakan alasan bukti petunjuk (qarinah) dalam mengungkapkan perkara perkara di mana masyarakat sesungguhnya khusus pada perkara pendanaan *walimatul urs*, tidak terbiasa untuk melakukan kesepakatan secara tertulis. Apalagi dalam suasana mempertemukan dua keluarga besar, maka hal hal yang dianggap tabu dan dapat menimbulkan kesan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak, tentu tidak akan dilakukan. Oleh karena keadilan hukum merupakan tujuan yang harus dicapai dalam suatu perkara hukum. Maka hakim dapat menggunakan intuisinya dalam mendapatkan tujuan tersebut.

KESIMPULAN

Perkara yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Rendah Syariah Bera, Negeri Pahang Kes mal, no. 06013-049-0159 tahun 2020 yang memutuskan menolak tuntutan Penggugat yang menuntut ganti rugi biaya *walimatul urs* sejatinya masih dapat ditinjau ulang. Hakim mesti berusaha untuk mendapatkan kebenaran materil dan tidak mendasarkan pada kebenaran formil semata. Hal itu dilakukan dalam upaya mendapatkan keadilan hukum yang menjadi tujuan dari sebuah peradilan.

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa kasus ini tidak dilanjutkan ke Mahkamah Rayuan sehingga alasan alasan yang mendasar dari penetapan putusan itu tidak didapatkan secara sempurna.

²⁵ Nurul Anis Izatul, wawancara terhadap Unit Undang-Undang Syariah dan Pengacara mewakili Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, pada tanggal 30 Juli 2023, pada jam 14.54wib.

²⁶ Maznah A.Majid, *Akta Prosedur Kewangan 1957 Penubuhan dan Arahan Akaun Amanah di Bawah Syeksyen 9 Akaun Amanah Bahagian Sokongan Keluarga Pahang Jabatan Kehakiman Syariah Pahang (Kod: 65112)* tersedia di <https://www.scribd.com/doc/129036568/trust-deed-SBSK-Negeri-Pahang-docx>

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, (Mutu Cetak Sdn.Bhd : 1997),hal,30

El-Qurtuby,Rasm Utsmani.Al-Quran Terjemahan.Selangor:Karya Bertari SDN BHD,2014,Surah Ar-Rahman : 60.

Bin Baz,A.A.(n.d.),*Min hadis maa saiun atsqola fil mizanal mukmin yaumul qiyamah min husnil khuluq*,hal web,
<https://www.alukah.net/sharia/0/108077/>

Mahkamah Rendah Syariah, di dalam "*Hujah Bertulis Plantif*",hal, 1-6.

Tetuan Izzat & Co.2020.*Hujahan Bertulis Plantif*.Mahkamah Rendah Syariah. Jalan Bukit Ubi.Kuantan.Pahang. hal. 33,22-23

HR Bukhari Muslim. Kitab Mahalli.Juz 3 hal. 294.

Enakmen Undang Undang Hukum Keluarga Islam Negeri Pahang tahun 2005. Lihat Juga Enakmen Pentadbiran undang undang Islam Negeri Pahang 2005 Syeksen 48 (2) (b).

JURNAL

Ridwan Nurdin.2018.*Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkahwinan(Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal)*.Kepala Batas.Pulau Pinang.Malaysia.Lihat di <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5561/0>

Fatin Najwa Binti Kamaruddin.2018. *Penetapan Uang Hantaran*. Pulau Pinang Malaysia.Lihat<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5754/1/Fatin%20Najwa%20Binti%20Kamaruddin.pdf>

S.Atalim, Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan No. 82 Pdt. G/2014/PN/Mks dalam Jurnal Hukum Adigama vol.2 No.2 Tahun 2019. Lihat di <https://jornal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/6524>

Ahmad Kurniawan, *Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Dalam Pembuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan(Studi Putusan*

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 1074 -1096 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5157

Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020) dalam Lihat
<http://etheses.uin-malang.ac.id/42466/>

Disarikan dari tulisan Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, Tulisan dalam Jurnal.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/78>

Portal Fakultas Hukum tersedia di <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>

Laman portal rasmi Kementerian Pembangunan Wanita,Keluarga dan Masyarakat tersedia di
<https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/index.php?r=portal/index>

Maznah A.Majid, *Akta Prosedur Kewangan 1957 Penubuhan dan Arahan Akaun Amanah di Bawah Syeksyen 9 Akaun Amanah Bahagian Sokongan Keluarga Pahang Jabatan Kehakiman Syariah Pahang (Kod: 65112)*tersedia di <https://www.scribd.com/doc/129036568/trust-deed-SBSK-Negeri-Pahang-docx>

WAWANCARA

Nurul Anis Izatul,Keterangan diperoleh melalui wawancara kepada peguam (pengacara) ,Encik Mohd Izzat Bin Mohd Sa'adan Kuantan, Pahang pada tanggal 27 juli 2023,Khamis,pada jam 10.00wib.

Nurul Anis Izatul, wawancara terhadap Unit Undang-Undang Syariah dan Pengacara mewakili Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, pada tanggal 30 Juli 2023,pada jam 14.54wib.